

Penggunaan Laptop di Pilkada Soppeng Dipertanyakan

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi mempertanyakan penggunaan komputer jinjing atau laptop dalam rekapitulasi suara di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Sebab, seharusnya penghitungan suara dituliskan dalam formulir secara manual. "Formulir itu harus cetakan, manual. Bagaimana bisa berkreasikan memakai laptop?" ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md dalam sidang sengketa pemilihan bupati Soppeng di Mahkamah Konstitusi kemarin.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Soppeng Muhammadiyah beralasan bahwa penggunaan laptop agar bisa menayangkan angka perolehan ke layar besar saat penghitungan. "Agar kami bisa menayangkan di depan dan bisa terlihat jelas nilai-nilai yang ada," kata dia. "Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, sama sekali tidak ada koreksi."

Pemilihan Bupati Soppeng dimenangkan oleh pasangan Andi Soetomo dan Aris Muhammadiyah dengan suara 53.589 atau 39,54 persen. Rivalnya, Andi Kaswadi Razak dan Andi Rizal Mappatunru, berada di urutan kedua dengan perolehan sebanyak 42.816 suara. Kubu Kaswadi dan Rizal lantas menggugat Komisi Pemilihan Umum Soppeng ke Mahkamah Konstitusi karena mensinyalir adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu.

Selain penggunaan laptop, Mahkamah mempertanyakan munculnya formulir pemilihan presiden dalam hasil penghitungan suara di Lilirilau. "Ini tulisannya kok formulir pemilihan presiden?" ujar Mahfud sembari membaca bukti yang diajukan oleh Amirullah Tahir, kuasa hukum kubu Kaswadi dan Rizal.

Adapun Mappinawang, kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Soppeng, terdiam dan tak menjawab pertanyaan tersebut.

Sementara itu, se usai sidang, Amirullah menduga ada rekayasa dengan ditemukannya formulir pemilihan presiden itu. Dia juga menduga formulir asli pemilihan kepala daerah diganti dengan angka-angka yang menguntungkan calon lain.

Walhasil, dengan berakhirnya sidang keempat sengketa pilkada Soppeng di Mahkamah, pihak terkait harus menyerahkan kesimpulannya pada Selasa hari ini sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah itu, mereka hanya bisa menunggu putusan Mahkamah. ● BUNGA MANGGIASIH

KPU Gowa Diperiksa Dewan Kehormatan Soal Ijazah Ichsan

"Kami bertanggung jawab soal verifikasi berkas Ichsan."

MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan segera membentuk dewan kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Kabupaten Gowa. Menurut Sekretaris KPU Sulawesi Selatan Annas G.S., dewan kehormatan akan meminta klarifikasi perihal proses verifikasi oleh KPU Gowa terhadap calon dalam pemilihan bupati lalu.

Annas mengatakan pembentukan dewan kehormatan bermula dari adanya surat dari KPU pusat.

Inti surat KPU bernomor 429/KPU/VII/2010 tertanggal 30 Juli itu, menurut Annas, adalah memerintahkan KPU Sulawesi Selatan memeriksa anggota KPU Gowa atas pelaksanaan proses verifikasi terhadap calon kepala daerah atas nama Ichsan Yasin Limpo.

Annas menjelaskan, KPU Sulawesi Selatan akan terlebih dulu menggelar rapat pleno untuk membentuk dewan kehormatan. Dewan kehormatan itu nantinya, menurut Annas, terdiri atas tiga orang. Dua dari KPU Sulawesi Selatan dan seorang lagi dari institusi di luar KPU. "Bisa dari kalangan akademisi," kata Annas.

Ketua KPU Sulawesi Selatan Jayadi Nas mengatakan rapat ple-

no pembentukan dewan kehormatan akan digelar setelah semua sidang gugatan di Mahkamah Agung selesai. "Mungkin pekan depan, setelah gugatan pilkada terakhir, yaitu Tana Toraja, yang bakal diputuskan Mahkamah Konstitusi beberapa hari lagi," katanya.

Dalam pelaksanaannya, Annas melanjutkan, ketiga anggota dewan kehormatan akan memeriksa lima anggota KPU Gowa berkaitan dengan proses verifikasi yang menjadi proses tahapan pemilihan bupati Gowa lalu.

Tapi, kata Annas, KPU Sulawesi Selatan juga bisa mengumpulkan bukti-bukti jika terjadi pelanggaran dalam proses verifikasi tersebut. "Pengumpulan bukti-

bukti bisa dilakukan lebih awal sebelum membentuk dewan kehormatan," katanya.

Adapun KPU Gowa menyatakan siap diperiksa. Sebab, menurut Ketua KPU Gowa Hirsan Bachtiar, pemeriksaan tersebut menjadi kewenangan KPU pusat melalui KPU provinsi. "KPU Gowa memang harus siap diperiksa," kata Hirsan saat dihubungi kemarin.

Hirsan enggan menanggapi materi klarifikasi perihal verifikasi ijazah Ichsan. Dia meminta agar melihat saat KPU provinsi memeriksa anggota KPU. Kendati begitu, dia menegaskan, "Kami akan mempertanggungjawabkan hasil verifikasi, khususnya berkas calon Ichsan." ● INDRA O Y | SAHRUL

Polisi Dinilai Ragu Ungkap Bom Molotov di Gowa

GOWA — Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar Abdul Muttalib menilai kepolisian ragu dalam menangani kasus dibakarnya tiga kantor kelurahan akibat dilempari bom molotov. Menurut dia, polisi seharusnya sejak awal memeriksa beberapa orang yang berada di lokasi kejadian. Apalagi polisi sudah mengumpulkan barang bukti. "Jika Polres Gowa ragu, Polda (Sulawesi Selatan) harus turun tangan," kata Muttalib saat dihubungi kemarin.

Dua hari lalu, tiga kantor kelurahan, yakni Paccinongan, Katangka, dan Pandang-pandang, dilempari bom molotov. Kelurahan Katangka mengalami kerusakan parah. Meja kerja, mesin tik, dan arsip-arsip berkas habis terbakar. Sedangkan dua kelurahan lainnya hanya terbakar pada bagian bawah pintu masuk.

Muttalib mengatakan polisi harus proaktif mengusut kasus ini. Jika polisi mendiagnosis kasus ini, masyarakat bakal curiga. Apalagi, menurut dia, situasi politik di sana sedang memanas pasca-terpilihnya kembali Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa.

Hingga kemarin, Polres Gowa belum memeriksa para saksi yang melihat kejadian itu. Berdasarkan pantauan *Tempo* di Kelurahan



Nelayan Tenggelam

Jenazah Daeng Limpo, 17 tahun, nelayan yang hilang di laut, dievakuasi Tim SAR di Pelabuhan Soekarno Makassar, kemarin. Nelayan Makassar yang hilang sejak Jumat (30/7) lalu, ditemukan terapung di perairan Pulau Barang Lompo, Makassar. Ia diperkirakan terkena badai.

Katangka, garis polisi sudah dilepas. Adapun aktivitas para pegawai kelurahan untuk sementara dipindah ke ruang tamu di bagian depan.

Kepala Reserse Kriminal Polres Gowa Komisaris Ardi Rahananto mengatakan polisi sudah mengumpulkan barang bukti berupa meja, mesin tik, dan beberapa arsip di Kelurahan Katangka. Se-

dangkan di Kelurahan Pandang-pandang dan Paccinongan, polisi mengambil dua bom molotov yang tidak terbakar. Barang bukti tersebut akan diteliti di laboratorium forensik. "Motif dibakarnya kantor kelurahan akan diketahui setelah hasil pemeriksaan forensik," ujarnya.

Ardi menegaskan, tidak ada keraguan di kepolisian untuk me-

nyelidiki kasus ini. Dia berkukuh polisi akan menunggu dulu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang-bukti di tempat kejadian.

Adapun Kepala Polres Gowa Ajun Komisaris Besar Rudi Hananto mengatakan polisi masih terus menyelidiki kasus ini. "Hasil penyelidikan sementara, diduga kriminal murni," ujarnya. ● SAHRUL